

## PERAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS SISWA

Dina Novita<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: Syamzainar

✉ [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)

Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim, Indonesia

e-mail: [novitadina355@gmail.com](mailto:novitadina355@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)<sup>2</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

**Submitted** : 2026-5-31  
**Review** : 2026-5-31  
**Accepted** : 2026-5-31  
**Published** : 2026-5-31

### KATA KUNCI

Pembelajaran PPKN, Sikap Demokratis, Karakter Siswa.

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk sikap demokratis siswa, mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif, serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa melemahnya nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda, seperti rendahnya toleransi, kurangnya partisipasi, dan memudarnya semangat musyawarah, menjadi persoalan yang perlu segera ditangani melalui jalur pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap demokratis siswa, terutama ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara aktif, partisipatif, dan kontekstual. Strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah, debat, dan proyek sosial terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokratis dibandingkan metode ceramah yang bersifat satu arah. Selain itu, guru PPKn yang berperan sebagai fasilitator sekaligus teladan moral di kelas memberikan pengaruh yang besar terhadap proses internalisasi nilai demokrasi pada diri siswa. Di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi, antara lain perbedaan karakteristik siswa, kurangnya dukungan lingkungan keluarga, pengaruh negatif budaya digital, serta keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa PPKn menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai wahana utama pembentukan karakter demokratis generasi muda Indonesia.

**Keywords:**

*PPKN Learning, Democratic Attitude, Student Character.*

**A B S T R A C T**

*This study aims to examine the role of Pancasila and Civic Education (PPKn) learning in shaping students' democratic attitudes, to identify effective learning strategies, and to determine the obstacles encountered during its implementation. The background of this study is based on the reality that the weakening of democratic values among the younger generation, such as low tolerance, lack of participation, and the fading spirit of deliberation, has become an issue that needs to be addressed urgently through education. This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature review of various scientific journals, books, and relevant educational policy documents. The results show that PPKn learning has a very significant role in shaping students' democratic attitudes, especially when the learning process is carried out in an active, participatory, and contextual manner. Learning strategies such as group discussions, deliberation simulations, debates, and social projects have proven to be more effective in instilling democratic values compared to one-way lecture methods. Furthermore, PPKn teachers who act as facilitators and moral role models in the classroom have a major influence on the process of internalizing democratic values in students. On the other hand, there are several obstacles that need to be overcome, including differences in student characteristics, lack of family support, negative influences of digital culture, and limitations in teacher competence in applying varied learning methods. This study concludes that PPKn holds a strategic position in the national education system as the primary vehicle for shaping the democratic character of Indonesia's younger generation.*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling mendasar dalam membangun karakter bangsa yang demokratis. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, muncul kebutuhan nyata untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan inilah yang menjadikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, karena muatan nilainya secara langsung menyentuh aspek pembentukan watak dan sikap warga negara.

Zamroni (2005) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru tentang nilai-nilai demokrasi. Definisi ini menegaskan bahwa PPKn bukan sekadar mata

pelajaran yang menyampaikan pengetahuan normatif, melainkan sebuah proses pembentukan kesadaran dan sikap yang berjangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran PPKn tidak semata diukur dari pencapaian kognitif siswa, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan, dengan fokus utama pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa, guna menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, PPKn mengemban tanggung jawab moral yang besar dalam membentuk identitas dan karakter warga negara sejak dini, jauh sebelum mereka terjun langsung ke dalam kehidupan sosial dan politik yang sesungguhnya (Nailayafa Afiqa dkk., 2025)

Kondisi kehidupan berbangsa saat ini menunjukkan berbagai gejala yang mengkhawatirkan. Penurunan moralitas di kalangan generasi muda merupakan akibat langsung dari globalisasi dan digitalisasi, yang ditandai oleh berkurangnya nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan persatuan, serta diperburuk oleh ketergantungan pada konten negatif. Gejala ini turut berpengaruh pada terkikisnya sikap demokratis di kalangan pelajar, seperti memudarnya rasa hormat terhadap perbedaan pendapat, rendahnya partisipasi dalam musyawarah, serta munculnya sikap intoleran terhadap sesama. Fenomena tersebut menjadi alarm bagi dunia pendidikan untuk segera memperkuat peran pembelajaran PPKn sebagai wahana utama pembentukan karakter demokratis (Sa'idaturrohmah, 2025)

Salah satu aspek terpenting yang harus dikembangkan melalui pembelajaran PPKn adalah sikap demokratis siswa. Sikap demokratis mencakup kemampuan menghargai pendapat orang lain, bersikap toleran terhadap perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Melalui penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran PPKn, peserta didik diharapkan mampu menjadi warga negara yang lebih aktif baik dalam penyampaian pendapat maupun dalam penentuan kebijakan, serta pada gilirannya turut mewujudkan masyarakat yang demokratis. Artinya, PPKn tidak hanya mengajarkan teori demokrasi, tetapi juga mendorong siswa untuk mempraktikkannya dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah maupun Masyarakat (Alifia Azzahra & Bambang Sumardjoko, 2023)

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai media pelaksanaan pendidikan demokrasi yang representatif, di mana demokrasi diajarkan dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan baik. Fungsi ini menegaskan bahwa PPKn bukan hanya bertindak sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai ruang latihan demokrasi bagi siswa. Di dalam kelas PPKn, siswa belajar mendengarkan, berdiskusi, menerima perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, yang semuanya merupakan praktik demokrasi dalam skala kecil namun sangat bermakna.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan sikap demokratis pada siswa bukanlah perkara mudah. Kajian literatur mengungkap adanya berbagai tantangan dalam proses ini, seperti dominasi pendekatan kognitif dalam pembelajaran serta keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis nilai. Kondisi ini membuat nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi bagian dari keseharian siswa justru hanya berhenti pada tataran hafalan dan pemahaman konseptual semata. Padahal, yang dibutuhkan adalah internalisasi nilai secara mendalam sehingga demokrasi benar-benar menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak siswa (Dini Wahdati & Khamim Zarkasih Putro, 2025)

Padahal, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa ketika pembelajaran PPKn dirancang dan dilaksanakan dengan tepat, hasilnya sangat signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn efektif dalam membentuk sikap demokratis siswa, terutama ketika guru menggunakan berbagai strategi seperti diskusi kelompok dan permainan peran untuk mengajarkan konsep demokrasi. Siswa menunjukkan peningkatan dalam hal menghargai pendapat orang lain, berkolaborasi dalam tugas, dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang dipilih guru menjadi penentu utama seberapa jauh nilai-nilai demokratis dapat tertanam dalam diri siswa.

Sejalan dengan itu, pembelajaran PPKn yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman belajar aktif terbukti mampu meningkatkan kesadaran demokrasi siswa tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku, seperti toleransi, partisipasi, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap perbedaan. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan guru memegang peranan kunci dalam keberhasilan internalisasi nilai-nilai demokratis pada diri siswa. Guru yang mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis, terbuka, dan partisipatif akan lebih berhasil menanamkan nilai demokrasi dibandingkan guru yang hanya mengandalkan ceramah satu arah (Jelsy Anjelina & Khamim Zarkasih Putro, 2026a)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan gotong royong yang penting dalam kehidupan bermasyarakat di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Kedua nilai ini pada dasarnya merupakan inti dari sikap demokratis, karena demokrasi sejati hanya dapat tumbuh subur di atas landasan toleransi dan semangat kebersamaan yang kuat (Putri & Siagian, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa menjadi sangat penting dan relevan untuk dikaji lebih mendalam. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari melemahnya sikap toleransi hingga rendahnya partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan bersama, menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkuat kualitas pembelajaran PPKn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kontribusi pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa, sekaligus mengidentifikasi strategi pembelajaran yang paling

efektif untuk diterapkan di kelas demi mewujudkan generasi muda yang benar-benar demokratis dalam pikiran, sikap, maupun tindakannya.

## **KAJIAN TEORI**

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa PPKn tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertugas membentuk kepribadian dan nilai-nilai pada diri siswa secara menyeluruh (Andi Baso & Nasrun Hasan, 2018)

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan nilai dan moral, dengan tujuan membentuk warga negara yang baik sejak jenjang pendidikan dasar. Tujuan ini menegaskan bahwa PPKn memiliki tanggung jawab yang bersifat jangka panjang, yaitu membentuk generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalankannya secara sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Intan Kusumawati dkk., 2025)

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pembelajaran PPKn sangat bergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Sikap interaktif guru PPKn dalam proses pembelajaran mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya, dan dukungan sekolah melalui kegiatan forum diskusi sangat membantu siswa dalam berpikir dan bersikap aktif. Artinya, guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang terbuka dan demokratis akan lebih berhasil menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswanya dibandingkan guru yang hanya mengandalkan metode ceramah satu arah.

Sikap demokratis adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikap ini meliputi kemampuan menghargai pendapat orang lain, bersikap toleran terhadap perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bersama. Musyawarah mufakat memiliki kelebihan berupa semua pihak merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil yang dicapai terasa sebagai bagian dari kepentingan bersama dan dapat menghindari klaim kebenaran secara sepihak (Dini Wahdati & Khamim Zarkasih Putro, 2025)

Pembentukan sikap demokratis pada siswa bukan sesuatu yang dapat terjadi begitu saja, melainkan memerlukan proses internalisasi nilai yang konsisten melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran nyata dari pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa guna meningkatkan civic disposition atau kecakapan kewarganegaraan mereka. Dengan demikian, PPKn menjadi ruang pembentukan sikap demokratis yang paling strategis di lingkungan sekolah

Pembelajaran PPKn memegang peran yang sangat penting dalam menanamkan sikap demokratis pada siswa. Guru PPKn memiliki peran kunci dalam menanamkan karakter demokratis siswa, salah satunya melalui kegiatan berorganisasi di lingkungan kelas sebagai bentuk latihan demokrasi langsung. Melalui pengalaman berorganisasi dan berdiskusi di kelas, siswa secara tidak langsung berlatih untuk mendengarkan, menghargai, dan menerima perbedaan pendapat

Selain itu, membangun sikap demokratis siswa dapat dilakukan melalui sikap interaktif guru di kelas dan pemberian materi PPKn dengan menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, serta membangun partisipasi siswa melalui proses pembelajaran di kelas. Penggunaan metode diskusi kelompok secara konsisten terbukti melatih siswa untuk berpikir kritis sekaligus menghormati sudut pandang orang lain, yang keduanya merupakan inti dari sikap demokratis (Jelsy Anjelina & Khamim Zarkasih Putro, 2026)

Oleh karena itu, kualitas pembelajaran PPKn yang berlangsung di kelas menjadi faktor penentu seberapa jauh sikap demokratis dapat tertanam dalam diri siswa. Guru yang menerapkan pendekatan partisipatif, membuka ruang dialog, dan menjadi teladan dalam bersikap demokratis akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar menyampaikan materi secara teoritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis Siswa**

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian yang relevan, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbukti memberikan kontribusi yang nyata dalam membentuk sikap demokratis siswa. Pendidikan PPKn yang berbasis nilai Pancasila terbukti efektif dalam membangun individu yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tantangan era globalisasi. Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi, pendidikan ini berperan dalam membentuk bangsa yang berperadaban tinggi, kompetitif, dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan bahwa PPKn bukan sekadar mata pelajaran pengetahuan, melainkan media pembentukan karakter yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan (jairin dkk., 2025)

Prinsip dari PPKn adalah membentuk masyarakat yang demokratis, sehingga tujuan PPKn adalah menciptakan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam sistem pemerintahan yang demokratis sebagai warga negara yang baik melalui pembekalan di bidang pengetahuan, karakter, maupun keterampilan. Dengan tujuan yang sedemikian luas, PPKn tidak hanya mengajarkan teori tentang demokrasi, tetapi juga membekali siswa dengan kecakapan untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan adanya peran nyata dari pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa guna meningkatkan civic disposition atau kecakapan kewarganegaraan mereka, dan hal ini telah dibuktikan melalui penelitian di SMA Negeri 4 Kotabumi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 68 siswa sebagai sampel penelitian. Temuan ini menjadi bukti empiris bahwa pengaruh pembelajaran PPKn terhadap sikap demokratis siswa bukan hanya bersifat teoritis, melainkan dapat diukur dan dibuktikan secara ilmiah (Steinmetz & Asbrock, 2026).

## **2. Strategi Pembelajaran PPKn yang Efektif dalam Membangun Sikap Demokratis**

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan pembentukan sikap demokratis siswa adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, guru PPKn dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, di antaranya melalui penyampaian materi secara teori, metode diskusi, pembentukan kelompok belajar, dan memberikan siswa kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya secara bebas. Kombinasi dari berbagai strategi inilah yang membuat pembelajaran PPKn menjadi lebih hidup dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Metode diskusi kelompok menempati posisi yang sangat penting dalam konteks ini. Melalui kegiatan diskusi kelompok yang dilandasi nilai-nilai sila keempat Pancasila yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sikap saling menghargai, serta kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Diskusi kelompok menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi pasif. Di dalam forum diskusi, siswa terlatih untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama — semuanya adalah keterampilan inti yang dibutuhkan dalam kehidupan demokratis (Patterson dkk., 2016)

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru juga menggunakan berbagai metode aktif seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah, dan debat yang bertujuan mendorong siswa untuk terbiasa menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, sehingga pembelajaran PPKn berkontribusi signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku demokratis siswa di lingkungan sekolah. Metode simulasi musyawarah khususnya sangat efektif karena siswa tidak hanya belajar tentang demokrasi secara konseptual, melainkan secara langsung mengalami dan menjalankan proses demokratis di dalam kelas.

Hal senada juga ditemukan dalam penelitian tentang internalisasi suara demokrasi. Strategi pembelajaran berbasis partisipasi menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dan bukan sekadar penerima materi. Interaksi sosial yang difasilitasi secara konstruktif terbukti mempercepat proses internalisasi nilai melalui dialog, sehingga internalisasi nilai demokrasi melampaui batas ruang kelas karena peserta didik kemudian mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika pembelajaran PPKn dirancang dengan benar, dampaknya tidak berhenti di pintu kelas, melainkan terbawa ke dalam kehidupan nyata siswa (Zulkanain dkk., 2025)

## **3. Peran Guru PPKn sebagai Fasilitator Demokrasi di Kelas**

Guru menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pembentukan sikap demokratis melalui pembelajaran PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran guru PPKn sudah cukup aktif dalam menanamkan karakter demokratis pada siswa, salah satunya melalui kegiatan penyusunan organisasi kelas yang menjadi wadah latihan berdemokrasi secara langsung. Keaktifan guru dalam memfasilitasi ruang-ruang demokratis di kelas menjadi prasyarat utama agar nilai-nilai demokrasi dapat benar-benar tertanam pada diri siswa

Sikap interaktif guru PPKn dalam proses pembelajaran mendorong siswa untuk ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya. Dukungan sekolah melalui kegiatan forum diskusi sangat membantu siswa dalam berpikir dan bersikap aktif, sementara

upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan mengupayakan pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi agar siswa mampu mengambil setiap keputusan, serta mengontrol tingkah laku siswa melalui kerja sama antara guru dan orang tua

Selain itu, guru PPKn berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan teladan moral di kelas. Melalui pendekatan pedagogis yang kontekstual, guru membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Budaya sekolah yang mendukung dan kegiatan ekstrakurikuler yang bernilai edukatif turut memperkuat proses internalisasi tersebut. Keteladanan guru menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena siswa tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari bagaimana guru bersikap dan bertindak di depan mereka (Pratomo & Wijayanti, 2026)

#### **4. Dampak Pembelajaran PPKn terhadap Pembentukan Toleransi dan Partisipasi Siswa**

Salah satu dimensi penting dari sikap demokratis adalah sikap toleransi, yaitu kemampuan menghargai dan menerima perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn melalui diskusi kelas, kerja kelompok heterogen, dan pengaitan materi dengan konteks keberagaman, serta keteladanan guru dalam interaksi pembelajaran, berkontribusi dalam memperkuat sikap toleransi dan membangun lingkungan belajar yang inklusif serta harmonis

Dimensi lainnya adalah partisipasi aktif. PPKn mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial melalui metode pembelajaran aktif seperti diskusi, simulasi, dan proyek sosial. PPKn yang dilaksanakan secara interaktif dan kontekstual dapat memperkuat karakter siswa sebagai warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Ketika siswa terbiasa dengan pola belajar yang interaktif di kelas PPKn, mereka secara bertahap mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Penelitian tentang internalisasi nilai demokrasi Pancasila juga memperkuat temuan ini. Penguatan nilai-nilai demokrasi di sekolah memberikan dampak positif, di mana internalisasi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara di sekolah meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai demokrasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter demokratis tidak hanya mencakup kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab ini menjadi bekal penting bagi siswa untuk menjadi warga negara yang tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga sadar akan kewajibannya terhadap sesama (Sunariati, 2023)

#### **5. Hambatan dalam Pembentukan Sikap Demokratis melalui Pembelajaran PPKn**

Meskipun pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat signifikan, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Faktor penghambat dalam proses pembelajaran nilai-nilai demokrasi di sekolah mencakup adanya perbedaan karakteristik siswa, lingkungan keluarga, dan kurang perhatian orang tua, sehingga hal ini dapat menghambat proses penanaman nilai-nilai demokrasi secara optimal. Kondisi lingkungan keluarga yang kurang mendukung seringkali membuat nilai-nilai demokratis yang sudah dibangun di sekolah tidak mendapat penguatan di rumah, bahkan dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan apa yang diterima siswa dalam lingkungan keluarganya.

Kendala lain yang juga sering dijumpai adalah pembelajaran yang masih monoton karena guru sering menggunakan metode ceramah serta strategi pembelajaran yang kurang menarik, sehingga minat dan keaktifan siswa menjadi rendah dan pemahaman nilai kewarganegaraan cenderung bersifat kognitif saja, bukan afektif atau kontekstual. Persoalan ini cukup serius karena pembentukan sikap demokratis mensyaratkan pendekatan yang menyentuh ranah afektif, bukan sekadar menambah pengetahuan di ranah kognitif. Jika guru terus terpaku pada metode ceramah, maka nilai-nilai demokrasi yang diajarkan hanya akan berhenti sebagai hafalan dan tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari karakter siswa

Hambatan berikutnya datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Kendala utama yang dihadapi siswa terdiri dari faktor internal seperti kurangnya kepercayaan diri, minimnya pemahaman terhadap materi, dan keterbatasan kemampuan komunikasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan belajar yang kurang mendukung serta kekhawatiran siswa terhadap penilaian dari teman-teman maupun dari guru. Kurangnya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat menjadi hambatan serius dalam proses latihan berdemokrasi di kelas, karena tanpa keberanian untuk berbicara, siswa tidak akan pernah benar-benar berlatih menjadi warga negara yang aktif dan demokratis.

Kendala utama lainnya dalam pelaksanaan peran PPKn mencakup rendahnya keterlibatan orang tua, pengaruh negatif budaya digital, dan terbatasnya waktu pembelajaran. Di era digital saat ini, pengaruh media sosial yang membawa konten-konten yang sarat polarisasi dan intoleransi turut menyulitkan guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai demokratis secara konsisten (Mumtaza dkk., 2024)

#### **6. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pembelajaran PPKn**

Berbagai hambatan yang ada tentu mendorong perlunya upaya nyata dari semua pihak untuk memperkuat efektivitas pembelajaran PPKn. Untuk mewujudkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran PPKn, diperlukan upaya mengatasi kendala dari faktor sikap peserta didik, faktor keluarga, dan faktor lingkungan pergaulan. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah penerapan model project citizen yang memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam gagasan dan tindakan sebagai warga sekolah dan warga negara yang baik. Model project citizen merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai agen perubahan, di mana mereka secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi masalah nyata di masyarakat dan merumuskan solusinya berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Dari sisi strategi pembelajaran yang lebih luas, metode pembelajaran PPKn yang mendorong siswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta keterlibatan aktif dalam masyarakat terbukti efektif. Dalam PPKn, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif. Prinsip ini mengarahkan guru untuk tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi menggabungkan berbagai pendekatan agar pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari.

Terkait penguatan dari sisi lingkungan belajar, strategi pembelajaran berbasis partisipasi yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dan bukan sekadar penerima materi terbukti mempercepat proses internalisasi nilai melalui dialog dan interaksi sosial yang difasilitasi secara konstruktif. Oleh karena itu, guru PPKn perlu secara sadar mengubah orientasi pembelajaran dari yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, dengan menyediakan ruang yang cukup bagi siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama (Zulkanain dkk., t.t.)

#### **7. Relevansi Pembelajaran PPKn dengan Konteks Demokrasi Pancasila**

Pembentukan sikap demokratis melalui PPKn tidak bisa dilepaskan dari konteks ideologi Pancasila yang menjadi landasan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan melalui PPKn bukan demokrasi liberal yang bersifat individual dan kompetitif, melainkan demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, khususnya yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi juga diimplementasikan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pembelajaran PPKn yang berhasil adalah pembelajaran yang mampu membawa nilai-nilai demokrasi Pancasila dari tataran konsep ke tataran perilaku nyata. Siswa yang berhasil disentuh oleh pembelajaran PPKn yang berkualitas tidak hanya pandai mendefinisikan demokrasi, tetapi juga mampu bersikap toleran ketika menghadapi perbedaan, berani menyampaikan pendapat secara santun, aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Itulah wujud nyata dari sikap demokratis yang sesungguhnya, dan itulah tujuan akhir yang hendak dicapai melalui pembelajaran PPKn.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Pembelajaran PPKn terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap demokratis siswa. Melalui pembelajaran PPKn yang dirancang secara baik dan dilaksanakan secara konsisten, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mengalami proses internalisasi nilai-nilai demokratis yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi kemampuan menghargai pendapat orang lain, bersikap toleran terhadap perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Hal ini membuktikan bahwa PPKn menjalankan fungsinya bukan sekadar sebagai mata pelajaran pengetahuan, melainkan sebagai ruang pembentukan karakter demokratis yang sesungguhnya.
2. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru PPKn menjadi faktor penentu keberhasilan dalam membentuk sikap demokratis siswa. Metode diskusi kelompok, simulasi musyawarah, debat, dan proyek sosial terbukti jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Ketika guru menciptakan suasana kelas yang terbuka, partisipatif, dan demokratis, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna karena mereka secara langsung melatih sikap demokratis dalam lingkungan yang nyata. Di sinilah peran guru PPKn sebagai fasilitator dan teladan moral menjadi sangat krusial, karena siswa tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan, tetapi juga dari cara guru bersikap dan berinteraksi di dalam kelas.
3. Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam proses pembentukan sikap demokratis siswa melalui pembelajaran PPKn. Hambatan tersebut antara lain berasal dari perbedaan karakteristik siswa, kurangnya dukungan lingkungan keluarga, pengaruh negatif budaya digital, serta keterbatasan kompetensi sebagian guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Hambatan-hambatan ini perlu disikapi secara serius oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia

pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, hingga pemangku kebijakan, agar pelaksanaan pembelajaran PPKn dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PPKn memiliki posisi yang strategis dan tidak tergantikan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam upaya membentuk generasi muda yang demokratis. Keberhasilan pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa sangat bergantung pada kualitas guru, ketepatan metode yang digunakan, serta dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Oleh karena itu, penguatan kualitas pembelajaran PPKn perlu terus menjadi prioritas agar tujuan menciptakan warga negara yang cerdas, toleran, dan berjiwa demokratis dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Azzahra & Bambang Sumardjoko. (2023). Analisis penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan organisasi siswa intra sekolah di sma negeri gondangrejo. Vol. 4 No. 2, Agustus 2023, hlm. 91–96.
- Andi Baso & Nasrun Hasan. (2018). Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di era globalisasi dalam mencegah perilaku menyimpang siswa di sman II kabupaten bulukumba. *jurnal etika demokrasi*, 25408763, Vol. 3 No. 2 (2018).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v3i2.1938>
- Dini Wahdati & Khamim Zarkasih Putro. (2025). Pembelajaran ppkn di sekolah dasar dalam menembangkan civic:disposition:study literature review. 2025-10-16, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Intan Kusumawati, Desi Mardianti, & Paiman. (2025). Media pembelajaran dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol. 16, No. 2, Juli2025,.
- jairin, wachid pratomo, dwi wijayanti, & Chairiyah. (2025). Pembentukan sikap demokratis siswa melalui internalisasi nilai sila keempat pancasila dalam kegiatan diskusi kelompok di kelas v sdn 02 kota bima, nusa tenggara barat. *Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta*. <https://doi.org/10.31932>
- Jelsy Anjelina & Khamim Zarkasih Putro. (2026a). Pkn sebagai pondasi demokrasi: Penguatan kesadaran kewarganegaraan anak sekolah dasar. *Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah*, 8No. 1, Halaman: 10–20, Januari, 2026.
- Jelsy Anjelina & Khamim Zarkasih Putro. (2026b). Ppkn sebagai pondasi demokrasi penguatan kesadaran kewarganegaraan anak sekolah dasar. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 8No. 1, 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/acyqpe47>
- Mumtaza, A. N., Akhwani, A., Rulyansyah, A., & Mustofa, M. (2024). Analisis Peran Guru dalam Menanamkan Sikap Demokratis Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi: Studi Kasus Guru Sekolah Dasar di Surabaya. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.772>
- Nailayafa Afiqa, Siti Sarah, Nazwa Kamila Aghna, Al Fathul Jadid Muhammad El Aziz, & Supriyono Supriyono. (2025). Degradasi moralitas generasi muda di era globalisasi: Relevansi pendidikan kewarganegaraan sebagai benteng karakter. 15-12-2025, Volume 9Nomor 3Tahun 2025, Halaman 37084-37088.
- Patterson, S. J., Pesenacker, A. M., Wang, A. Y., Gillies, J., Mojibian, M., Morishita, K., Tan, R., Kieffer, T. J., Verchere, C. B., Panagiotopoulos, C., & Levings, M. K. (2016). T regulatory cell chemokine production mediates pathogenic T cell attraction and suppression. *The Journal of Clinical Investigation*, 126(3), 1039–1051. <https://doi.org/10.1172/JCI83987>
- Pratomo, W., & Wijayanti, D. (2026). Pembentukan sikap demokratis siswa melalui internalisasi nilai sila keempat pancasila dalam kegiatan diskusi kelompok di kelas v sdn 02 kota bima, nusa tenggara barat. 11.
- Putri, F. M., & Siagian, L. (2024). Pemahaman Demokrasi melalui Pembelajaran PPKn dalam

- Pengembangan Civic Disposition Siswa Kelas VII: Studi Kasus SMP Negeri 3 Binjai Tahun Pelajaran 2023/2024. *Journal on Education*, 6(4), 22068–22078.  
<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6327>
- Sa'idaturrohmah, S. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Seyegan.
- Steinmetz, K., & Asbrock, F. (2026). From political to democratic sophistication—A critical reappraisal. *British Journal of Social Psychology*, 65(1), e70035.  
<https://doi.org/10.1111/bjso.70035>
- Sunariati, D. (2023). Perwujudan Pendidikan Karakter Peserta Didik Kelas XII dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 23–30.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i1.1841>
- Zulkanain, A. I., Musyafa, R. A., Rahmadana, N., & Maraya, A. K. (t.t.). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Siswa.
- Zulkanain, A. I., Musyafa, R. A., Rahmadana, N., & Maraya, A. K. (2025). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Berdemokrasi di Kalangan Siswa.